

**PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA**

**RIRIN MARDHANI SYAKUR
A032191005**



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

**PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:

**RIRIN MARDHANI SYAKUR
A032191005**



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

**PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA**

disusun dan diajukan oleh

RIRIN MARDHANI SYAKUR
A032191005

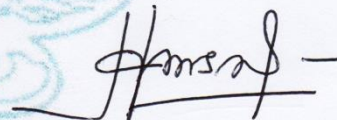
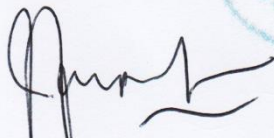
telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
pada tanggal **3 Februari 2022**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Komisi Penasihat

Ketua

Anggota

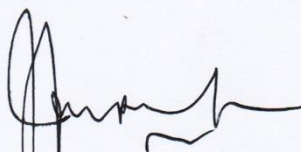


Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, SE., MA., CWM®
NIP. 19651012 199903 2 001

Prof. Dr. Drs. Abdul Hamid Paddu, MA., CRP
NIP. 19590306 198503 1 002

Ketua Program Studi Magister
Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, SE., MA., CWM®
NIP. 19651012 199903 2 001

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 19640205 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ririn Mardhani Syakur

Nim : A032191005

Program Studi : Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

Jenjang : S2

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/diterbitkan sebelumnya, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, Februari 2022



Ririn Mardhani Syakur

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanya untuk Allah SWT, dzat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang tak henti-hetinya memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh ummat manusia. Berkat izin-Nya pula lah penulis mampu menyelesaikan Tesis yang berjudul “PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA”. Tak lupa pula penulis hanturkan shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sang pejuang kemanusiaan, pembela kaum tertindas, yang telah menjadi suri tauladan umat menuju gerbang pencerahan, semoga kelak penulis mampu mengikuti jejak perjuangan Beliau. Aamiin.

Tesis ini merupakan sebuah karya penulis yang masih jauh dari sempurna, sebuah tulisan yang bahkan oleh penulis sendiripun tak akan menyangkal untuk mengakuinya sebagai sebuah karya yang belum layak baca. Akan tetapi sebagai sebuah proses awal, penulis berharap tulisan ini mampu memberikan banyak pelajaran dan mampu menjadi pemantik semangat dalam melahirkan karya-karya selanjutnya. Karya yang mendidik, karya yang jujur, dan tentu saja karya yang telah layak baca. Harapan itu tidak hanya untuk penulis sendiri tapi untuk para pembaca sekalian, baik yang sengaja maupun yang secara tak sengaja membaca Tesis ini.

Banyak kendala yang penulis hadapi dalam rangka penyusunan tesis ini, dan hanya berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihaklah penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Indraswati Tri Abdireviane, SE., MA., CWM® sebagai Pembimbing I sekaligus Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan dan Bapak Prof. Dr. Drs Abdul

Hamid Paddu, MA., CRP. sebagai Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingannya yang diberikan selama menyelesaikan tesis ini.

Atas segala bantuan yang penulis terima selama mengikuti program S2, penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Ekonomi Unhas, Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. Beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unhas. Terimah kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen yang pernah mengajar penulis pada Program S2 Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Unhas dan kepada seluruh anggota tim penguji: Prof. Marzuki, SE., DEA., Ph.D, Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA., CWM® dan Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM® yang telah meluangkan waktu dalam meneliti keabsahan dan memberikan kritik serta saran yang sangat berguna atas penyempurnaan tesis ini. Terima kasih penulis ucapkan juga kepada seluruh staf akademik Pasca Ekonomi Unhas yang dengan senang hati membantu penulis dalam menyelesaikan urusan akademik.

Penulis tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman EPP Unhas 2019, Teman-teman S1 Ilmu Ekonomi khususnya sahabatku Maryana Ningsih, Zulfi Qadri, Khairil Aswandi, Eko Wibowo yang senantiasa memberikan semangat, membantu dan mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian tesis ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada teman berbagai semangat semasa kuliah yaitu Nursinah Amrullah, Cici Mahmut dan Shaleh Rahim, yang senantiasa membantu penulis serta semangat dan doa yang tiada henti serta teman-teman dan para sahabat di Pasca Ekonomi dan Bisnis UNHAS EPP, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Hal yang sama penulis ucapkan kepada Saudara penulis, Adek Wira Zulkifly Syakur yang selalu memberikan semangat semasa penyusunan tesis ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa hormat dan penuh kepatuhan serta terima kasih yang tak terhingga atas keikhlasan kedua orangtua, Ayahanda Syakur Marasi, S.H., M.M dan Ibunda Hj. Hartati, dalam mendidik, membesarkan, dan mendoakan penulis. Penulis juga sangat bersyukur dan merasa beruntung karena tidak hanya sebagai orangtua, keduanya juga sangat berperan dalam memberikan petunjuk, doa, saran, motivasi dan telah memberikan niat dan ruh suci dan keikhlasan dalam menuntut ilmu sehingga penulis dapat mencapai cita-cita. Maha Suci Engkau Ya Allah tidaklah ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau telah beritahukan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui segala hikmah. Engkau memberi hikmah kepada siapa saja yang dianugrahi karunia yang banyak dan hanya orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Wallahu'alam.

Makassar, Februari 2022

Ririn Mardhani Syakur

ABSTRACT

RIRIN MARDHANI SYAKUR. *The Influence of Fiscal and Monetary Policy on Indonesia's Economic Growth* (Supervised by **Indraswati Tri Abdireviane** and **Abdul Hamid Paddu**)

This study aims to examine the effectiveness of fiscal and monetary policies in influencing economic growth in Indonesia and to examine the effect of unemployment and investment in mediating the relationship between the dependent variables (taxes, government spending, credit interest rates, and the money supply) on Indonesia's economic growth.

The data used were secondary data obtained from the World Bank and the Indonesian Central Statistics Agency. The data in this study was an annual time series from 2000-2019. This study used the Path analysis method with the Amos program.

The findings of this study indicate that taxes and government spending directly have a positive effect on economic growth, but credit interest rates and the money supply have a negative effect. Meanwhile, the indirect effect of taxes and government spending on economic growth through unemployment and investment has a negative effect, but interest rates and the money supply have a positive effect.

Keywords: Taxes, Government Expenditures, Credit Interest Rates, Money Supply, Unemployment, Investment, Economic Growth



ABSTRAK

RIRIN MARDHANI SYAKUR. *Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia* (dibimbing oleh Indraswati, Tri Abdireviane, dan Abdul Hamid Paddu).

Penelitian ini bertujuan melihat efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta melihat pengaruh pengangguran dan investasi dalam memediasi hubungan antar variabel dependen yaitu: pajak, pengeluaran pemerintah, suku bunga kredit, dan jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari World Bank dan Badan Pusat Statistik Indonesia. Data adalah deret waktu tahunan dari tahun 2000 - 2019. Data dianalisis menggunakan metode analisis *path* dengan program Amos.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung pajak dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, suku bunga kredit dan jumlah uang beredar memiliki pengaruh negatif. Adapun, pengaruh tidak langsung pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengangguran dan investasi memiliki pengaruh negatif. Namun, suku bunga dan jumlah uang beredar memiliki pengaruh yang positif.

Kata kunci: pajak, pengeluaran pemerintah, suku bunga kredit, jumlah uang beredar, pengangguran, investasi, pertumbuhan ekonomi



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	13
2.1.2 Pengangguran	15
2.1.3 Investasi	16
2.1.4 Kebijakan Fiskal.....	19
2.1.5 Pajak	21
2.1.6 Pengeluaran Pemerintah	23
2.1.7 Kebijakan Moneter	24
2.1.8 Suku Bunga Kredit.....	26
2.1.9 Jumlah Uang Beredar	27
2.2 Hubungan Antar Variabel	28
2.2.1 Kaitan Teoritis Pajak, Pengangguran, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi	30
2.2.2 Kaitan Teoritis Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran, investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi	32
2.2.3 Kaitan Teoritis Suku Bunga, Pengangguran, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi	33

2.2.4 Kaitan Teoritis Jumlah Uang Beredar, Pengangguran, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi	35
2.3 Kajian Empiris	36
BAB III RERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	41
3.1 Rerangka Konseptual	41
3.2 Hipotesis	45
BAB IV METODE PENELITIAN	46
4.1 Pendekatan Penelitian.....	46
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	46
4.3 Populasi dan Sampel.....	46
4.4 Jenis dan Sumber Data	46
4.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	47
4.6 Metode Analisis Data	47
4.7 Definisi Operasional Variabel	49
BAB V HASIL PENELITIAN.....	51
5.1 Deskripsi Data Penelitian	51
5.2 Analisa Hasil Penelitian	57
5.3 Pembahasan	62
BAB VI PENUTUP	70
6.1 Simpulan	70
6.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata merupakan salah satu kondisi utama bagi kelangsungan ekonomi di suatu negara sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan dalam suatu pembangunan (Mahdi, Aimon, & Syofyan, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mempengaruhi peningkatan serta percepatan pembangunan ekonomi di Negara tersebut yang akhirnya berindikasi pada membaiknya kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi mengacu pada perubahan bersifat kuantitatif. Pada umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun (Mahdi et al., 2015). Produk Domestik Bruto (PDB) ini mencerminkan pendapatan dari faktor-faktor produksi dalam suatu Negara. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi yang tersedia di Negara tersebut, maka pertumbuhannya akan semakin membaik.

Teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*) dipelopori oleh Paul M. Romer yang menemukan model pertumbuhan endogen ala Romer (1989) menyatakan bahwa istilah pertumbuhan *endogenous* muncul pada tahun 1980-an yang didasarkan pada temuan-temuan empiris maupun teoretis. Temuan tersebut diklasifikasikan sebagai perkembangan dalam teori pertumbuhan neoklasik yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi itu sendiri bukannya datang dari luar (Wijayanto, 2019). Kelompok teori ini juga menganggap bahwa keberadaan infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional

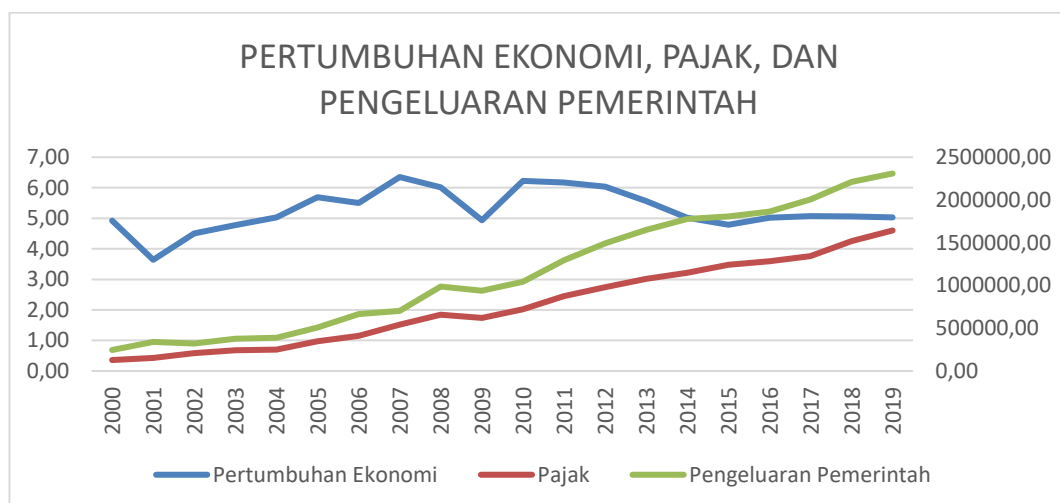
sebagai faktor penting yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Ma'ruf & Latri, 2008).

Pemerintah memiliki dua kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang perekonomian nasional: produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga (Fathurrahman, 2012). Artinya keuangan negara tidak hanya penting untuk membiayai tugas rutin pemerintah saja, tetapi juga sebagai "sarana" untuk mewujudkan sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, kestabilan dan pemerataan pendapatan. Keynes berpendapat bahwa ada dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan kebijakan fiskal, yaitu: *income approach* (melalui pajak) dan *expenditure approach* (melalui pengeluaran). Dalam menentukan komposisi APBN inilah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran pemerintah dapat memberi stimulasi kepada perekonomian untuk bertumbuh melalui kebijakan fiskal yang ekspansif melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak untuk meningkatkan permintaan agregat di dalam perekonomian menyebabkan pendapatan naik yang akan mengurangi pengangguran yang ada untuk mencapai tingkat pendapatan kesempatan kerja penuh.

Pengeluaran pemerintah dalam upaya pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia (khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya) dengan melakukan promosi-promosi ke berbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat. Dengan melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan,

khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil akan menjadi sebuah solusi dalam mengatasi tingkat pengangguran di Indonesia.

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai belanja tidak langsung dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Watulingas, Rotinsulu, & Siwu, 2016). Pajak sebagai penerimaan pemerintah merupakan salah satu alat yang cukup penting bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya, terutama sebagai stabilisator perekonomian melalui kebijakan anggaran guna menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup. Jika pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pajak pada periode waktu tertentu, umumnya satu tahun. Maka pemerintah mengalami defisit anggaran. Sebaliknya jika penerimaan pajak lebih tinggi dibandingkan pengeluaran pemerintah, maka pemerintah mengalami surplus anggaran. Pemerintah membiayai defisit anggaran dengan meminjam, sedangkan hutang pemerintah relatif lebih ringan. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya, pengeluaran pemerintah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung (Anitasari & Soleh, 2012).



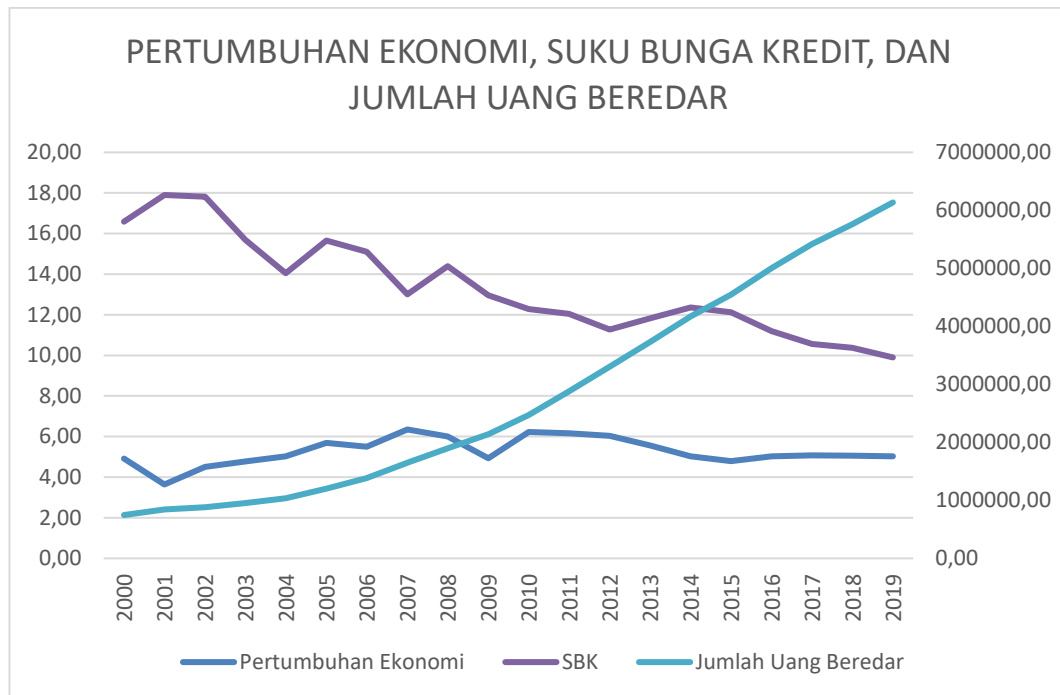
Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Pajak

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak tahun 2000 dapat dilihat pada Gambar 1.1 grafik diatas yang secara keseluruhan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2000 perekonomian Indonesia hanya tumbuh sebesar 4,92%, namun terjadi penurunan ke titik 3,64%. Di tahun 2002 pertumbuhan Indonesia mulai meningkat hingga tahun 2011 dari 4,5% ke 6,17% walaupun terjadi penurunan di tahun 2009. Dari tahun 2012 hingga 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengalami penurunan, dimana terjadi penurunan pada periode 2014-2015 dan periode 2016-2019. Gambar 1.1 juga memperlihatkan bahwa data pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 pajak di Indonesia sebesar Rp. 128 Triliun kemudian terus mengalami peningkatan dan akhirnya pajak di tahun 2019 sebesar Rp. 1,643 Triliun. Gambar 1.1 menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sama halnya juga pajak yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2000 jumlah pengeluaran pemerintah sebesar Rp. 245 Triliun kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2019 jumlah pengeluaran pemerintah mencapai Rp. 2,309 Triliun.

Pemerintah juga menggunakan kebijakan moneter untuk menjaga kestabilan perekonomian. Kebijakan moneter adalah satu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal demi tercapainya tujuan ekonomi makro. Stabilisasi ekonomi dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi).

Tingkat bunga digunakan untuk menstabilkan jumlah uang beredar pada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar perekonomian semakin membaik. Semakin tinggi tingkat bunga, maka jumlah uang beredar semakin berkurang. Sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga, maka jumlah uang beredar semakin bertambah.

Dalam kenyataannya kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal dan moneter juga tergantung pada kondisi perekonomian, dimana kebijakan fiskal dan moneter berbeda pada saat kondisi sebelum krisis ekonomi terjadi dan kebijakan setelah krisis ekonomi terjadi.



Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga Kredit

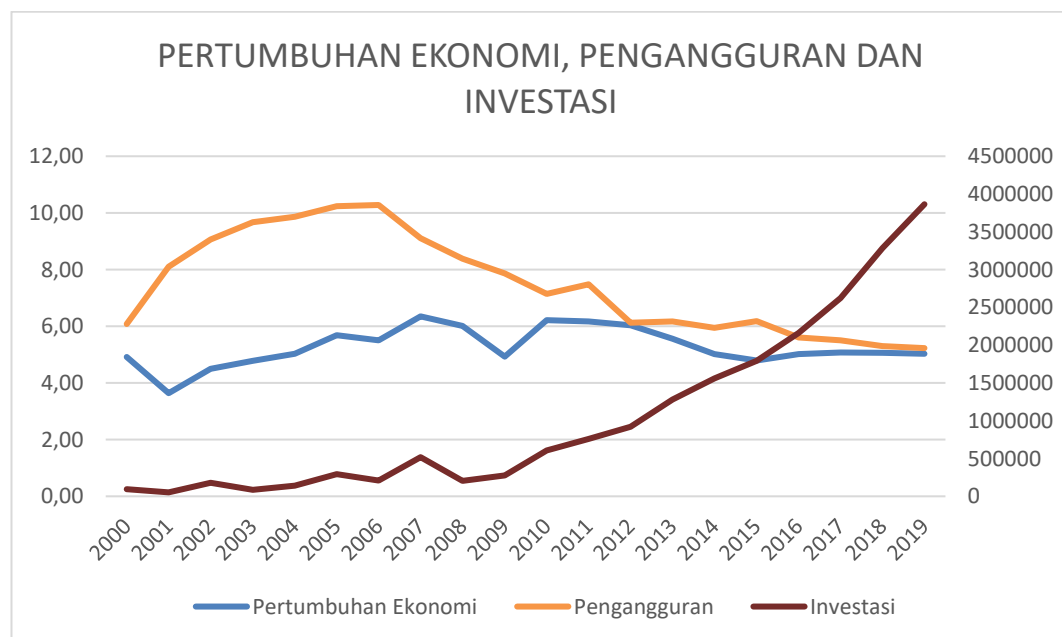
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak tahun 2000 dapat dilihat pada Gambar 1.2 grafik diatas yang secara keseluruhan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2000 perekonomian Indonesia hanya tumbuh sebesar 4,92%, namun terjadi penurunan ke titik 3,64%. Di tahun 2002 pertumbuhan Indonesia mulai meningkat hingga tahun 2011 dari 4,5% ke 6,17% walaupun terjadi penurunan di tahun 2009. Dari tahun 2012 hingga 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengalami penurunan, dimana terjadi penurunan pada periode 2014-2015 dan periode 2016-2019. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa jumlah uang beredar di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Pada tahun 2000 tingkat suku bunga kredit sebesar 16,59% dan cenderung mengalami penurunan hingga di tahun 2019 tingkat suku bunga kredit di Indonesia sebesar 9,90%. Suku bunga

kredit cenderung mengalami penurunan, namun terdapat periode-periode tertentu dimana tingkat suku bunga meningkat, seperti periode 2001 sebesar 17,90%, tahun 2005 sebesar 15,66%, tahun 2008 sebesar 14,40% dan di tahun 2014 sebesar 12,36%. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa jumlah uang beredar di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2000 jumlah uang beredar sebesar Rp. 747 Triliun dan terus meningkat hingga tahun 2019 sebesar Rp. 6,136 Triliun.

Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi dimasa mendatang (Hidayati, 2017). Investasi adalah langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Menurut Rostow bahwa setiap upaya untuk tinggal landas mengharuskan adanya mobilitas tabungan dalam dan luar negeri dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi (Sari, Syechalad, & Sabri Abdul Majid, 2016).

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran amat erat kaitannya dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Logikanya sederhana, apabila seseorang tidak bekerja maka dia tidak akan memproduksi sehingga perhitungan output produksi dalam bagian PDB akan berkurang. Implikasinya secara makro, berdasarkan Okun's Law, ada hubungan empiris dimana kenaikan 1 persen dari angka pengangguran akan menurunkan nilai PDB hingga maksimal 2 persen (Akhmad, 2018).

Tingkat pengangguran di Indonesia disebabkan beberapa hal yakni jumlah lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, adanya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), kemajuan teknologi dimana robot mulai mengambil peran dalam melakukan kegiatan produksi, kurangnya pendidikan dan keterampilan, serta beberapa faktor lain yang menyebabkan pengangguran di Indonesia. Salah satu contoh kasus meningkatnya pengangguran disebabkan masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy dalam laman CNN Indonesia, mengatakan bahwa setiap investasi dari perusahaan asal China atau negara lain pasti ada perjanjian bisnis. Salah satu poinnya memuat soal tenaga kerja. Beberapa investor asing kerap membawa tenaga kerja dari negara mereka untuk bekerja di Indonesia, sehingga tingkat pengangguran masih belum teratasi.



Gambar 1.3 Grafik Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak tahun 2000 dapat dilihat pada Gambar 1.3 grafik diatas yang secara keseluruhan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2000 perekonomian Indonesia hanya tumbuh sebesar 4,92%, namun terjadi penurunan ke titik 3,64%. Di tahun 2002 pertumbuhan Indonesia mulai meningkat

hingga tahun 2011 dari 4,5% ke 6,17% walaupun terjadi penurunan di tahun 2009. Dari tahun 2012 hingga 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengalami penurunan, dimana terjadi penurunan pada periode 2014-2015 dan periode 2016-2019. Gambar 1.3 menjelaskan bahwa tahun 2000 tingkat pengangguran Indonesia sebesar 6,08%. Tingkat pengangguran tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2006 sebesar 10,28% tingkat pengangguran di Indonesia periode 2007-2019 cenderung mengalami penurunan dari 9,11% ke 5,23%, hal itu disebabkan karena peningkatan tingkat pengangguran terbuka dalam beberapa tahun terakhir adalah adanya pemutusan hubungan kerja serta daya serap yang menurun karena adanya peningkatan jumlah angkatan kerja. Realisasi investasi di Indonesia dari tahun 2000-2007 mengalami fluktuatif dan terjadi penurunan di tahun 2001 dan 2004. Dari tahun 2008-2019 investasi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana realisasi investasi Indonesia tertinggi terjadi di tahun 2019 sebesar Rp. 386,498 triliun dan terendah pada tahun 2001 Rp. 5,221 triliun akibat krisis finansial dunia yang mengakibatkan menurunnya investasi di Indonesia.

Teori klasik yang membahas pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh peran pemerintah adalah Teori Klasik Keynes. Teori ini beranggapan bahwa campur tangan pemerintah dalam ekonomi menentukan pembangunan ekonomi dapat berjalan maksimal. Implikasi pandangan Keynes adalah bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian baik melalui kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) maupun kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah) (Azwar, 2016).

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam memengaruhi pertumbuhan

ekonomi di Inonesia, serta melihat pengaruh pengangguran dan investasi dalam memediasi hubungan antara variabel dependen (pajak, pengeluaran pemerintah, suku bunga kredit dan jumlah uang beredar) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2000-2019. Dari ketiga gambar grafik, memberikan gambaran kondisi perekonomian di Indonesia yang dimana kondisi tersebut ada yang berfluktuasi dan ada juga yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dengan kondisi perekonomian di Indonesia seperti yang terlihat pada ketiga grafik diatas, penulis juga tertatik terhadap teori Keynes dan beberapa ahli ekonomi lainnya yang telah mengembangkan beberapa teori tentang pertumbuhan ekonomi dalam menjelaskan keterkaitan variabel dalam penelitian ini.

Beberapa bukti empiris berikut menjadi referensi dilakukannya penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Balqis Hanifata (2018) menemukan bahwa variabel jumlah uang beredar memiliki pengaruh terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel pajak, pengeluaran pemerintah dan suku bunga tdk memiliki pengaruh terhadap penerimaan tenaga kerja di Indonesia. Penelitian yg dilakukan Agandrowa Gula (2018) menemukan bahwa aspek moneter dan fiskal memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dimana sebagian hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak yang tidak signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sementara uang beredar dan penerimaan pajak tahun sebelumnya memiliki dampak yang signifikan dan positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, uang beredar, dan penerimaan pajak tahun sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Andi Ika Fahrika (2016) menemukan bahwa tingat suku bunga memiliki pengaruh positif terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang

dilakukan Asnawi dan Hadizatul Fitria (2018) menemukan bahwa jumlah uang beredar memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan variabel suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun beberapa penelitian lain di berbagai negara tentang pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi seperti penelitian yang dilakukan oleh Tan (2020) tentang pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia, Singapura, dan Thailand memperlihatkan hasil bahwa kebijakan moneter dan fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut dimana kebijakan moneter lebih efektif di negara Malaysia dan Singapura, sedangkan kebijakan fiskal lebih efektif di negara Thailand. Penelitian yang dilakukan Tung (2022) tentang pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di Vietnam menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Vietnam dimana kebijakan moneter lebih besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Vietnam dibandingkan dengan kebijakan fiskal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran dan investasi?

2. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran dan investasi?
3. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran dan investasi?
4. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran dan investasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tax ratio terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran dan investasi.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran dan investasi.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran dan investasi.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui pengangguran dan investasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, maka hasilnya diharapkan dapat diambil manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi atau masukan terhadap perbedaan kinerja pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini juga sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan ekonomi terutama tentang pola pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi para peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan agar informasi dapat disampaikan dengan urutan logis dan berdasarkan aturan. Sistematika penulisan disajikan ke dalam empat bab sebagai berikut.

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Pendahuluan menguraikan latar belakang yang menjelaskan fenomena dan alasan sehingga penelitian ini dilakukan. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dan tujuan penelitian di uraikan. Setelah itu kegunaan penelitian juga dicantumkan sesuai dengan yang diharapkan dari penelitian ini. Sistematika penulisan menjadi bagian akhir dari uraian bab pertama.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan teori dan konsep serta tinjauan empiris. Tinjauan teori dan konsep menjelaskan teori yang mendasari penelitian dan tinjauan empiris yang sangat relevan dengan topik penelitian.

Bab ketiga adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Bagian ini berisi teori dan tinjauan empiris yang memperlihatkan kaitan antar variabel dan dijelaskan sebagai kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab keempat adalah metode penelitian. Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

Bab kelima adalah hasil dan pembahasan penelitian. Bab ini menguraikan deskripsi data, deskripsi hasil penelitian, menguraikan penyajian hasil pengolahan data dalam bentuk tabel dan deskripsi hasil penelitian. Bab ini juga menguraikan pembahasan atas hasil penelitian dimana dihubungkan dengan hipotesis-hipotesis yang telah dibuat kemudian dibandingkan dengan tujuan penelitian dan teori-teori pendukungnya.

Bab keenam adalah penutup. Bab ini menguraikan simpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata merupakan salah satu kondisi utama bagi kelangsungan ekonomi di suatu negara sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan dalam suatu pembangunan (Mahdi et al., 2015). Pertumbuhan dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi dapat tercipta melalui bekerjanya pasar secara efisien. Tingkat pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dari perubahan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun (Salim, 2017).

Pertumbuhan ekonomi sebenarnya merupakan masalah perekonomian jangka panjang, dan oleh Simon Kuznets, seorang ahli ekonomi terkemuka di Amerika Serikat yang pernah memperoleh hadiah Nobel menyatakan bahwa, proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakannya sebagai Modern Economic Growth dimana dalam periode tersebut, dunia telah mengalami perkembangan pembangunan yang sangat nyata apabila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Ramayani, 2015). Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Terdapat beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan PDB dan bukan indikator lainnya seperti pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai indikator pertumbuhan. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, data PDB yang digunakan adalah data PDB atas harga konstan. Dengan

menggunakan data atas dasar harga konstan, maka pertumbuhan PDB semata-mata hanya mencerminkan pertumbuhan output yang di hasilkan perekonomian pada suatu periode tertentu.

GDP mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang di produksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, GDP sering digunakan sebagai salah satu tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu negara dan dapat dibandingkan antara satu negara dengan negara lain dengan mengkonversikannya menjadi satu mata yang sama (Richard & Toly, 2013).

Teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*) dipelopori oleh Paul M. Romer yang menemukan model pertumbuhan endogen ala Romer (1989) menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi public dan penerimaan dari pajak. Kelompok teori ini juga menganggap bahwa keberadaan infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional sebagai faktor penting yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Ma'ruf & Latri, 2008).

Pembangunan ekonomi suatu Negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. Kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercipta dengan bekerjanya pasar yang secara efisien. Mekanisme pasar dapat bekerja secara efisien jika tersedia tata aturan dan hukum-hukum pasar yang terlaksana dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prsetasi dari perkembangan suatu ekonomi. Dalam kegiatan suatu perekonomian yang

sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti peningkatan jumlah produksi barang industry, perkembangan infrastruktur, peningkatan jumlah sekolah, peningkatan produksi sektor jasa, dan peningkatan perproduksi barang modal. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang diukur melalui persentase pertambahan pendapatan rill. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan dimana terjadinya pertambahan atau perubahan pendapatan nasional dalam satu tahun tertentu, tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya (Todaro, 2004).

2.1.2 Pengangguran

Pengangguran amat erat kaitannya dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Logikanya sederhana, apabila seseorang tidak bekerja maka dia tidak akan berproduksi sehingga perhitungan output produksi dalam bagian PDB akan berkurang. Implikasinya secara makro, berdasarkan Okun's Law, ada hubungan empiris dimana kenaikan 1 persen dari angka pengangguran akan menurunkan nilai PDB hingga maksimal 2 persen (Akhmad, 2018). Oleh karena itu permasalahan pengangguran, harus segera dicarikan jalan keluar, apabila hal tersebut dibiarkan, maka dapat menimbulkan tindakan kriminal dan anarkis, sehingga akan mengancam ketenteraman kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Suparmoko, pengangguran adalah ketidakmampuan angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan atau mereka inginkan. Jadi dapat disimpulkan pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang yang sudah tergolong angkatan kerja belum mendapat pekerjaan dan berusaha mencari pekerjaan (Kalsum, 2017). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan

penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator. Indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan, tingkat inflasi, kemiskinan, serta besaran upah yang berlaku. Apabila di suatu negara pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah. Menurut Sukirno, jika tingkat upah naik akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran pula, sedangkan tingkat inflasi yang tinggi akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran (Novriansyah, 2018).

2.1.3 Investasi

Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi dimasa mendatang (Hidayati, 2017). Investasi adalah langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan tinggi dan lesunya pembangunan. Isu mengenai investasi sering mendapat banyak tanggapan oleh para teoritis dan praktisi pembangunan. Pandapat tentang pentingnya investasi dalam manunjang pembangunan negara-negara berkembang dimulai dengan ditemukannya model pertumbuhan setelah perang dunia ke II yaitu pada tahun 1950-an dan 1960-an oleh beberapa ahli

pembangunan seperti Rostow dan Harrod-Domar. Menurut Rostow bahwa setiap upaya untuk tinggal landas mengharuskan adanya mobilitas tabungan dalam dan luar negeri dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi (Sari et al., 2016).

Harrod-Domar mengembangkan teori Keynes dengan memberi peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai sifat ganda yang dimiliki investasi (Sulistiwati, 2012). Pertama, investasi menciptakan pendapatan (merupakan dampak dari permintaan investasi), dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok kapital (merupakan dampak dari penawaran investasi). Kemudian Solow dan Swan mengoreksi teori Harrod-Domar dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Asumsi yang digunakan adalah skala pengembalian yang konstan (*constan return to scale*), substitusi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) bersifat sempurna, dan adanya produktivitas marjinal yang semakin menurun (*diminishing marginal productivity*) dari tiap inputnya.

Melihat kondisi Indonesia, setidaknya ada lima alasan mendasar mengapa Indonesia membutuhkan investasi asing saat ini (Kurniawan, 2016):

- a. Penyediaan lapangan kerja
- b. Mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa
Kehadiran penanaman modal asing dapat dipergunakan untuk membantu mengembangkan industri substitusi impor dalam rangka menghemat devisa.
- c. Mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor non-migas untuk mendapatkan devisa.

- d. Pembangunan daerah-daerah tertinggal. Investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan, listrik, air bersih, jalan, rel kereta api, dan lain-lain.
- e. Alih teknologi. Salah satu tujuan mengundang modal asing adalah untuk mewujudkan alih teknologi.

Ada beberapa anggapan mengenai manfaat investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebagai berikut (Kurniawan, 2016):

1. Investasi asing akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru, memperluas pasar atau merangsang penelitian dan pengembangan teknologi lokal yang baru.
2. Investasi asing akan meningkatkan daya saing industri ekspor, dan merangsang ekonomi lokal melalui pasar kedua (sektor keuangan) dan ketiga (sektor jasa/pelayanan).
3. Investasi asing akan meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan lokal/nasional, serta memperkuat nilai mata uang local untuk pembiayaan impor.
4. Pembayaran utang adalah esensial untuk melindungi keberadaan barang-barang finansial di pasar internasional dan mengelola integritas sistem keuangan. Kedua hal ini, sangat krusial untuk kelangsungan pembangunan.
5. Sebagian besar negara-negara di dunia ketika tergantung pada investasi asing untuk menyediakan kebutuhan modal bagi pembangunan karena sumberdayasumberdaya lokal tidak tersedia atau tidak mencukupi.
6. Para penganjur investasi asing berargumen bahwa sekali investasi asing masuk, maka hal itu akan menjadi batu alas bagi masuknya investasi

lebih banyak lagi, yang selanjutnya menjadi tiang yang kokoh bagi pembangunan ekonomi keseluruhan.

2.1.4 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara pada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan. Kebijakan fiskal pada umumnya mempresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan, yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Berbagai pilihan tersebut, dalam tataran praktisnya di manifestasikan melalui anggaran pemerintah, yang ada di Indonesia lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Nangarumba, 2016).

Pengaruh kebijakan fiskal yang signifikan terhadap perekonomian dikemukakan oleh Keynes. Sebelum Keynes, operasi keuangan pemerintah dipandang tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja dan permintaan agregat. Peran pemerintah pada saat itu hanya sebatas merelokasi sumber daya finansial dari sektor swasta ke pemerintah. Setiap tambahan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan penurunan pengeluaran swasta (*crowd-out*) dalam jumlah yang sama dan pengeluaran tersebut tidak akan mengubah pendapatan agregat. Kemudian pandangan tersebut diubah oleh Keynes dan sejak saat itu ekonom mulai menekankan dampak makro atas pengeluaran dan pajak pemerintah. Keynes menekankan

bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah tidak hanya memindahkan sumber daya dari sektor swasta ke pemerintah (Surjaningsih, Utari, & Trisnanto, 2012).

Dari sudut ekonomi makro, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua yaitu Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kebijakan Fiskal Kontraktif (Nova & Daud, 2006). Kebijakan Fiskal Ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, pada saat munculnya kontraksional gap. Kontraksional gap adalah suatu kondisi dimana output potensial lebih tinggi dibandingkan dengan *output actual*. Pada saat terjadi kontraksional gap ini kondisi perekonomian ditandai oleh tingginya tingkat pengangguran. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk meningkatkan output.

Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan pemerintah dengan cara menurunkan belanja Negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini yang bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (*overheating*) untuk menurunkan tekanan permintaan pada saat munculnya ekspansional gap. *Ekspansional gap* adalah suatu kondisi dimana *output* potensial lebih kecil di bandingkan dengan *output actual*. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan memperbesar pengeluaran pemerintah, sedangkan kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan meningkatkan penerimaan pemerintah dari perpajakan dan cukai (Wasiaturrahma, 2013).

Menurut Ibrahim, tujuan dari kebijakan fiskal, yaitu (Nurlina & Zurjani, 2018):

1. Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.

2. Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusaha-kan kesempatan kerja (mengurangi pengang- guran), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.
3. Untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

2.1.5 Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Menurut Soemitro dalam Judy (2016) menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai belanja tidak langsung dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dengan demikian, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut (Ryan, Tinangon, & Inggriani, 2014):

1. Pajak yang dipungut berdasarkan Undang-Undang.
2. Jasa timbal balik yang tidak di tunjukkan secara langsung.
3. Pajak yang di pungut oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Dapat di paksakan (bersifat yuridis).

Diketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran Negara. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), dimana

penerimaan utamanya berasal dari pajak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara sulit untuk dapat terlaksana karena kurangnya dana untuk dapat membiayai suatu kegiatan di Negara tersebut. Dengan berkembangnya suatu Negara maka akan semakin banyak masyarakat maju dan meningkat dalam taraf hidupnya. Disamping meningkatkan taraf hidup, maka akan semakin banyak masyarakat untuk membayar pajak kepada Negara dan semakin banyak juga pendapatan yang diperoleh Negara dari pembayaran pajak (Sondakh, 2015).

Pada era sekarang ini, dalam menyusun anggaran pendapatan belanja negara (APBN), pemerintah memberikan beban yang berat terhadap sektor pajak dalam upaya memberikan kontribusi pada pembangunan. Sadar akan fungsinya sebagai tulang punggung dalam membiaya pembangunan, penerimaan pajak dari waktu ke waktu terus ditingkatkan yang dapat dilihat dari *tax ratio* sebagai indikatornya. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio itu dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Dengan demikian, pada hakikatnya rasio pajak bisa dipergunakan untuk melihat indikasi besarnya beban pajak (*tax burden*) yang harus ditanggung masyarakat (Ikhsan & Amir, 2016).

Tax ratio atau rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dalam persen. *Tax ratio* menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali produk domestik bruto dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi *tax ratio* suatu negara, maka akan semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Karena semakin tinggi juga nilai rupiah yang dapat dipungut sebagai penerimaan pajak dari setiap rupiah output nasional (GDP).

2.1.6 Pengeluaran Pemerintah

Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam pengertian umum, anggaran berimbang yaitu suatu kondisi dimana penerimaan sama dengan pengeluaran. Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. Sedangkan anggaran defisit yaitu anggaran dimana pengeluaran lebih besar dari penerimaan. Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi. Sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya, pengeluaran pemerintah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung (Anitasari & Soleh, 2012).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X - M)$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian (Afiat, 2015).

Pengeluaran pemerintah versi Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Dimana formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan tersebut disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari

waktu ke waktu dapat di ketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Anitasari & Soleh, 2012).

Pengeluaran pemerintah dilihat dari belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak digunakan secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja pemeliharaan. Anggaran belanja tidak langsung memegang peran penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan tercapainya sasaran pada tujuan setiap tahap pembangunan. Pengeluaran pemerintah dilihat dari belanja langsung adalah belanja yang di gunakan oleh adanya program dan kegiatan yang di rencanakan. Belanja langsung ini merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Pengeluaran ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi (Haryanto, 2013).

2.1.7 Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan bentuk pengendalian besaran moneter dalam mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang merupakan kebijakan dari bank sentral atau otoritas moneter. Kebijakan moneter berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, sesuai dengan apa yang ingin dicapai yang berlaku pada perekonomian tersebut. Kestabilan ekonomi merupakan tujuan kebijakan moneter yang dapat diukur melalui seberapa besar kesempatan kerja, dan kestabilan harga pasar serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kebijakan moneter digunakan apabila kestabilan dalam kegiatan ekonomi terganggu, maka kebijakan moneter yang digunakan untuk memulihkan kondisi tersebut. Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian dari kebijakan

ekonomi makro dalam hal mempengaruhi kegiatan perekonomian. Menurut Pohan, indikator dan orientasi kebijakan moneter, yaitu (Nurlina & Zurjani, 2018):

1. Tingkat suku bunga

Kebijakan moneter yang menggunakan suku bunga sebagai sasaran antara akan menetapkan tingkat suku bunga yang ideal untuk mendorong kegiatan investasi. Apabila suku bunga menunjukkan kenaikan melampaui angka yang ditetapkan, bank sentral akan segera melakukan ekspansi moneter agar suku bunga turun sampai pada tingkat yang ditetapkan tersebut, dan begitu sebaliknya.

2. Uang beredar

Kebijakan moneter yang menggunakan monetary aggregate atau uang beredar sebagai sasaran menengah mempunyai dampak positif berupa tingkat harga yang stabil. Apabila terjadi gejolak dalam jumlah besaran moneter, yaitu melebihi atau kurang dari jumlah yang ditetapkan, Bank Sentral akan melakukan kontraksi atau ekspansi moneter sedemikian rupa sehingga besaran moneter akan tetap pada suatu jumlah yang ditetapkan.

2.1.8 Suku Bunga Kredit

Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967 bab 1 pasal 1, 2 yang merumuskan pengertian kredit sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan. Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang yang dinyatakan dalam persen per satuan waktu (per bulan atau per tahun). Dalam kamus ilmu ekonomi bunga

diartikan sebagai imbalan yang dibayarkan oleh pinjaman atas dana yang diterima, bunga dinyatakan dalam persen (Tuwonusa, Rotinsulu, & Mandei, 2016).

Pergerakan di suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Besar perubahan suku bunga BI direspon dengan kebijakan moneter yang dinyatakan dalam perubahan tingkat suku bunga BI. Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang telah besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan tingkat suku bunga dapat dilakukan dalam lipatan. Naik turunnya tingkat suku bunga dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan uang (Susanto, 2018). Tingkat suku bunga cenderung naik/meningkat apabila permintaan debitur/peminjam lebih besar dari pada jumlah uang atau dana yang ditawarkan kreditur. Sebaliknya, tingkat suku bunga cenderung menurun apabila permintaan debitur lebih kecil daripada jumlah uang atau dana yang ditawarkan kreditur.

2.1.9 Jumlah Uang Beredar

Jumlah Uang Beredar adalah penawaran uang (*money supply*) adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat, berupa penjumlahan dari uang kartal dan uang giral. Jumlah uang beredar di masyarakat besarnya sudah tentu, didasarkan kepada otoritas moneter, yakni Bank Sentral.

Perkembangan jumlah uang beredar mencerminkan atau seiring dengan perkembangan ekonomi, biasanya bila perekonomian bertumbuh dan berkembang, jumlah uang beredar juga bertambah sedangkan komposisinya berubah. Jika perekonomian semakin maju, porsi penggunaan uang kartal semakin sedikit lalu digantikan dengan uang giral (Panorama, 2016).

Uang giral yang diterbitkan oleh bank umum yang berupa saldo rekening yang ada di bank umum. Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral yang terdiri atas uang logam dan uang kertas. Uang kertas juga ada yang masuk ke kas Negara, misalkan pembayaran pajak dan uang kartal yang masuk ke kas bank umum, misalnya pembayaran dari masyarakat yang menabung ke bank umum (Musyaffa' & Sulasmiyati, 2017).

Kebijakan moneter adalah instrument yang sering digunakan oleh otoritas moneter untuk mempengaruhi kondisi makroekonomi yang terlaksana melalui pasang uang. Secara khusus, kebijakan moneter bisa di artikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh otorita moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu Negara.

Total stok uang dalam suatu kegiatan perekonomian dalam satu periode tertentu yang umumnya satu tahun sering disebut sebagai Jumlah Uang Beredar/JUB (*money supply*). Jumlah uang beredar ini bukan hanya uang yang beredar di tangan masyarakat saja, tetapi juga adalah uang yang dikeluarkan secara resmi oleh Bank Sentral maupun bank umum (Afrizal, 2017).

1. Teori Kuantitas

Model Klasik tentang uang sering disebut sebagai teori kuantitas, yang mempunyai hubungan dengan tingkat harga absolut yang ditentukan oleh penawaran uang nominal. Teori ini menyimpulkan bahwa tingkat harga merupakan akibat utama adanya perubahan jumlah uang beredar

2. Teori Keynes

Keynes tidak melihat Jumlah uang beredar merupakan faktor eksogen dalam kegiatan suatu perekonomian. Menurut Keynes, uang beredar sebagai faktor yang sangat ditentukan oleh kegiatan ekonomi suatu

masyarakat. Jadi menurut Keynes besarnya angka pelipat uang dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi.

3. Teori Kaum Monetaris

Menurut pandangan kaum Monetaris, bahwa perubahan jumlah uang beredar tidak terpengaruh oleh kegiatan ekonomi, Sehingga jumlah uang beredar merupakan faktor eksogen. Konsep ini berbeda dengan pandangan Keynes. Sehingga kaum moneteris, Milton Friedman menganggap bahwa uang beredar sangat mempengaruhi dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi suatu masyarakat.

2.2 Hubungan Antar Variabel

Filosofi kebijakan fiskal didasari oleh teori Keynes yang lahir sebagai reaksi atas terjadinya depresi besar (*great depression*) yang melanda perekonomian Amerika pada tahun 1930-an. Keynes mengkritik pendapat ahli ekonomi Klasik yang menyatakan bahwa perekonomian akan selalu mencapai *full employment* sehingga setiap tambahan belanja pemerintah akan menyebabkan turunnya pengeluaran swasta (*crowding out*) dalam jumlah yang sama atau dengan kata lain setiap tambahan belanja pemerintah tersebut tidak akan mengubah pendapatan agregat (Setiawan, 2018).

Teori klasik yang membahas pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh peran pemerintah adalah Teori Klasik Keynes. Teori ini beranggapan bahwa campur tangan pemerintah dalam ekonomi menentukan pembangunan ekonomi dapat berjalan maksimal. Implikasi pandangan Keynes adalah bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian baik melalui kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) maupun kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah) (Azwar, 2016). Teori juga mengatakan bahwa tingkat pengangguran juga dipengaruhi oleh

inflasi, kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah dan pajak) serta kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) yang ditetapkan pemerintah dalam mengatur laju pertumbuhan ekonomi (Asyulinda, Amar, & Aimon, 2015).

Keynes mengemukakan bahwa sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian menuju kondisi *full employment*. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan campur tangan pemerintah dalam bentuk berbagai kebijakan, salah satu perwujudannya adalah kebijakan fiskal dan moneter. Menurut Keynes, setiap tambahan belanja pemerintah tidak hanya merelokasi sumber daya dari sektor swasta kepada pemerintah, tetapi juga disertai dengan adanya dampak pengganda fiskal (*multiplier effect*) atas belanja tersebut (Setiawan, 2018).

Dalam pendekatan Keynes, kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek *multiplier* dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Demikian pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan *disposable income* dan pada akhirnya mempengaruhi permintaan. Kecenderungan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan *marginal propensity to consume* (MPC), menjadi rantai perekonomian untuk peningkatan pengeluaran yang lebih banyak dan pada akhirnya terhadap *output* (Surjaningsih et al., 2012).

Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat atau permintaan efektif sebagai faktor utama penggerak perekonomian, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting (Sulistiawati, 2012). Keynes memandang pemerintah sebagai agen independen yang mampu menstimulasi perekonomian melalui kerja publik. Kebijakan pemerintah yang ekspansioner dapat menaikkan "permintaan efektif" jika sumber daya diakai tanpa merugikan konsumsi atau investasi. Pada masa resesi, kenaikan pada pengeluaran Pemerintah (G) akan

mendorong kenaikan konsumsi (C) dan investasi (I), dan karenanya dapat menaikkan GDP (Y). Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Keynes sebagai landasan teori dalam penelitian ini, adapun hubungan antar variabel independen dan dependen adalah sebagai berikut.

2.2.1 Kaitan Teoritis Pajak, Pengangguran, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi

Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Sebagai fungsi anggaran, pajak merupakan sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (Sulastyawati, 2014). Pengeluaran Negara dilakukan oleh pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan sumber pembiayaan yang tidak sedikit (Darusman, 2019). Besarnya pendapatan negara dengan pajak sebagai peyumbang terbesar yang dianggarkan dalam APBN mempengaruhi alokasi belanja yang akan dilakukan oleh Pemerintah, salah satunya adalah belanja infrastruktur. Apabila infrastruktur di Indonesia meningkat, maka akan berdampak pada kegiatan perekonomian, salah satunya dengan memperlancar arus barang dan jasa. Dengan lancarnya arus barang dan jasa maka akan meningkat pula volume perdagangan di Indonesia yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Darusman, 2019).

Pajak merupakan salah satu unsur dari tiga komponen penyusun PAD. Menurut Novita, kenaikan penerimaan pajak daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan infrastruktur daerah (Kresnandra & Erawati, 2013). Selain penyediaan fasilitas fisik, hasil dari pajak daerah dapat juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kreatifitas dan menarik minat masyarakat untuk turut serta, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut ditambah lagi

dengan tersedianya fasilitas publik baru, terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat akan tercipta yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat pengangguran di kabupaten/kota tersebut (Kresnandra & Erawati, 2013). Dengan menurunnya tingkat pengangguran diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Banyak cara dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan ekonomi, salah satunya dengan cara menarik para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. (Sarwedi, 2002) menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana yang besar untuk menjalankan pembangunan nasional, karena Indonesia masih mencari dana untuk pembangunan dalam upaya menyetarakan pembangunan di berbagai sektor dari negara maju, di tingkat regional maupun global. Kebijakan investasi tersebut akan terkait langsung dengan penanaman modal asing pada sektor-sektor ekonomi di Indonesia. Tujuan dari perusahaan multinasional yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara berinvestasi, oleh karena itu mereka sangat sensitif terhadap faktor pajak, karena pajak memiliki efek langsung terhadap keuntungan mereka (Azam & Lukman, 2008). Perpajakan mengambil peran penting dalam ekonomi politik komparatif yang disebut dengan globalisasi dan jika suatu negara menurunkan tarif pajak maka akan meningkatkan proses pertumbuhan dan perkembangan negara tersebut karena secara positif akan menarik para investor (Gedik, 2013).

2.2.2 Kaitan Teoritis Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran, investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran

pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah (Lubis, 2014). Teori Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak dapat menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan adanya pengeluaran pemerintah yang diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung jika meningkat maka menyebabkan GNP akan meningkat pula.

Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam pengertian umum anggaran berimbang yaitu suatu kondisi dimana penerimaan sama dengan pengeluaran. Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. Sedangkan anggaran defisit yaitu anggaran pengeluaran lebih besar dari penerimaan. Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi. Sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung (Anitasari & Soleh, 2012).

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana yang besar untuk menjalankan pembangunan nasional, karena Indonesia masih mencari dana untuk pembangunan dalam upaya menyetarakan pembangunan di berbagai sektor dari negara maju, di tingkat regional maupun global. Oleh karena itu Indonesia memanfaatkan sumber Investasi Asing Langsung (*foreign direct investment*) untuk pembiayaan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia (Sarwedi, 2002).

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah juga dipengaruhi oleh besarnya investasi. Kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan ketepatan arah investasi ke daerah-daerah yang dapat menciptakan kesempatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (danawati, 2016).

2.2.3 Kaitan Teoritis Suku Bunga, Pengangguran, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Suku bunga merupakan salah satu variabel makroekonomi yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Suku bunga mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat dan mempunyai dampak penting terhadap perekonomian. Kurang bersaingnya harga barang dan jasa domestik menyebabkan rendahnya permintaan terhadap produk dalam negeri. Produksi menjadi dikurangi, sejumlah pengusaha akan mengurangi produksi. Produksi yang berkurang akan menyebabkan sejumlah pekerja kehilangan pekerjaannya. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mendorong Bank sentral menaikkan tingkat suku bunga, hal ini menyebabkan terjadinya kontraksi atau pertumbuhan negatif di sektor riil dan dampak yang lebih jauh adalah pengangguran menjadi semakin tinggi (A.Yehosua, Rotinsulu, & Niode, 2019).

Selain itu, suku bunga juga memengaruhi keputusan dalam hal mengkonsumsi, menginvestasi, dan menabung (Hazmi, 2018). Tingkat suku bunga merupakan fungsi dari investasi. Tingkat suku bunga yang rendah dapat membuat investasi meningkat dan pada akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat (Asnawi & Fitria, 2018).

Tingkat suku bunga Bank Indonesia atau BI 7-Day Repo Rate adalah suku bunga instrument dari Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia melalui kebijakan moneter (*policy rate*), dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga, sehingga

mempengaruhi tingkat suku bunga antar bank. Suku bunga akan mempengaruhi tabungan, mengendalikan uang beredar, mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Suku bunga sebagai alat bank sentral dalam mengendalikan laju inflasi. Suku bunga yang tinggi dapat mengakibatkan *cost of money* menjadi mahal, sehingga dapat melemahkan daya saing ekspor, mengurangi investasi, produksi menurun sehingga pada akhirnya akan memberi pengaruh terhadap penurunan output (Yazid, 2018).

Dengan demikian BI 7-Day Repo Rate tersebut memberikan sinyal bahwa pemerintah mengharapkan pihak perbankan dapat menggerakkan sektor riil untuk dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kenaikan BI 7-Day Repo Rate akan mendorong kenaikan suku bunga dana antar bank dan suku bunga deposito yang akan mengakibatkan kenaikan suku bunga kredit. Sementara jika BI 7-Day Repo Rate diturunkan dikhawatirkan akan memicu pelarian dana jangka pendek yang akan mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi (Indriyani, 2016).

2.2.4 Kaitan Teoritis Jumlah Uang Beredar, Pengangguran, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian suatu negara tidak terlepas dari kegiatan pembayaran uang. Jika membahas tentang lalu lintas pembayaran uang berarti menyangkut jumlah uang beredar. Perubahan jumlah uang beredar berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian di berbagai sektor. Jika jumlah uang beredar tinggi, maka menyebabkan inflasi. Kemudian, bila jumlah uang beredar sangat rendah akan menyebabkan kelesuan terhadap ekonomi. Jika hal ini terjadi terus menerus, kesejahteraan masyarakat akan menurun (Siburian & Murtala, 2019). Inflasi yang tinggi dapat mendorong Bank sentral menaikkan tingkat suku bunga, hal ini menyebabkan terjadinya kontraksi atau pertumbuhan negatif di sektor riil dan

dampak yang lebih jauh adalah pengangguran menjadi semakin tinggi (A.Yehosua et al., 2019).

Jumlah uang beredar memiliki peran yang penting sebagai alat transaksi penggerak dalam perekonomian. Besar kecilnya jumlah uang beredar akan mempengaruhi daya beli riil masyarakat dan juga ketersediaan komoditi masyarakat. Jumlah uang beredar yang ada pada masyarakat harus berkembang secara wajar. Hal ini tentunya akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian, namun perkembangan yang terlalu meningkat tajam akan dapat memicu inflasi yang tentunya memberikan pengaruh *negative* terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pada dasarnya, jumlah uang beredar ditentukan oleh besarnya penawaran uang dari (Bank Sentral) dan permintaan uang dari masyarakat (Permatasari, 2017). Dampak yang sama akan dirasakan oleh investor dalam kegiatan investasi mereka, dimana kegiatan investasi akan menurun ketika inflasi meningkat, hal tersebut terjadi karena tingginya inflasi menyebabkan naiknya biaya-biaya produksi yang belum tentu akan diimbangi dengan meningkatnya pendapatan, sehingga perusahaan akan mengalami kerugian dan berdampak pada kegiatan investasi.

Meningkatnya jumlah uang beredar maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini terkait karena dengan adanya peningkatan jumlah uang beredar, maka masyarakat akan menempatkan sebagian dananya untuk konsumsi sehingga membuat produsen memproduksi barang lebih banyak kemudian permintaan akan faktor produksi akan meningkat, hal ini akan berpengaruh pada pendapatan perkapita kemudian akan meningkatkan pertumbuhan (Asnawi & Fitria, 2018).

2.3 Kajian Empiris

Nurlina dan Zurjani (2018) menulis penelitian tentang dampak kebijakan fiskal dan moneter dalam perekonomian Indonesia. Data yang digunakan adalah data penerimaan pajak Indonesia, tingkat suku bunga (BI 7-Day Repo Rate) dan data Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari tahun 2003-2017 yang diperoleh dari situs BPS Indonesia, Bank Indonesia, dan Direktorat Jendral Pajak. Data dianalisis dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah, (1) Variabel penerimaan pajak dan suku bunga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, (2) variabel pajak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia, (3) variabel suku bunga berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia, (4) secara simultan penerimaan pajak dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Endah Alfiana Dewi (2016) menulis penelitian tentang analisis pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap pendapatan nasional dan nilai tukar di Indonesia tahun 1990-2015. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan simultan *Two Stage-Least Square* (TSLS) dengan data runtun waktu 1990Q1-2015Q3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel nilai tukar mempengaruhi pendapatan nasional secara positif dan signifikan. Sementara itu, variabel suku bunga mempengaruhi pendapatan nasional secara negatif signifikan. Variabel PDB dan variabel nilai tukar mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap nilai tukar. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal yang direpresentasikan oleh rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasional dan juga nilai tukar, sedangkan kebijakan moneter yang direpresentasikan oleh tingkat suku bunga berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pendapatan nasional dan secara positif signifikan terhadap nilai tukar.

Ratnawati Prayogi (2012) menulis penelitian tentang dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap kinerja perekonomian Indonesia: suatu aplikasi model makroekonomi *Three-Gap*. Model Makroekonomi *Three-Gap* Indonesia dibangun sebagai model ekonometrika dalam bentuk sistem persamaan simultan dan diestimasi menggunakan metode *Two-Stage Least Squares (2SLS)*. Data yang digunakan adalah data *time series* tahun 1969-2000. Hasil empiris menunjukkan bahwa kesenjangan yang negatif di sektor swasta (defisit tabungan) tidak menjadi kendala bagi pertumbuhan ekonomi sepanjang terjadinya peningkatan investasi swasta yang antara lain dibiayai oleh aliran dana asing (*foreign direct investment* dan *foreign loans*). Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif. Sebaliknya, kesenjangan yang negatif pada sektor public (defisit fiskal) menjadi kendala bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena penurunan penerimaan pemerintah memperlemah kekuatan fiskal. Defisit fiskal dapat mengakibatkan makin besarnya beban bunga jika defisit ditutup dengan pinjaman. Oleh karena itu, di samping melakukan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, pemerintah perlu melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pengeluarannya.

Balqis Hanifata (2018) menulis penelitian tentang pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan pendekatan Model Penyesuaian Parsial atau *Partial Adjustment Model (PAM)* dengan menggunakan software SPSS. Analisis menunjukkan bahwa Variabel independen (independen) yang berpengaruh hanya variabel jumlah uang beredar dengan nilai signifikansi 0,0254 yang berarti secara parsial berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia pada tingkat signifikansi 0,05. Sebaliknya, variabel penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, pengeluaran

pemerintah, dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan nyata terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia.

Agandrowa Gula (2018) menulis penelitian tentang analisis pengaruh aspek moneter dan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis Ordinary Least Square (OLS) Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek moneter dan fiskal memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, Sebagian, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak yang tidak signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sementara uang beredar dan penerimaan pajak tahun sebelumnya memiliki dampak yang signifikan dan positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, Ini berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, uang beredar, dan penerimaan pajak tahun sebelumnya. Berdasarkan model estimasi hasil yang diketahui kondisi ekonomi akhirat krisis ekonomi memiliki efek yang signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami krisis ekonomi yang jelek pada 1997.

Asnawi dan Hadizatul Fitria (2018) menulis penelitian tentang pengaruh jumlah uang beredar, tingkat suku bunga dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data metode analisis yang digunakan adalah Multiple linear regresi. Data yang digunakan adalah waktu data seri dari 1999-2017 yang diinterpolasi. Hasil sebagian menunjukkan bahwa uang beredar dan inflasi memiliki positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sementara suku bunga tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara bersamaan uang beredar, suku bunga dan inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Lisa Irma Abigael Lebang, Debby Ch. Rotinsulu, dan George M.V Kawung (2017) dalam penelitian yang berjudul Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di kota bitung, teknik analisis yang digunakan Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota bitung dan secara bersama-sama pengeluaran pemerintah dan investasi swasta di kota bitung.

Andi Ika Fahrika (2016) menulis penelitian tentang pengaruh tingkat suku bunga melalui investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah model persamaan struktural (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta di indonesia, (2) investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia, (3) tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia.

Wiwiet Aji Prihatin, Arintoko, Suharno (2019) dalam penelitian tentang analisis pengaruh variabel-variabel moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan teknik estimasi Ordinary Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel suku bunga SBI dan jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel kurs dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia periode 2010-2017.

Isay S.H Adu (2013) menulis penelitian tentang Error Correction Model :Dampak kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kestabilan perekonomian nasional serta dunia terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. Dengan model analisis

Error Correction Model (ECM) penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar, kestabilan perekonomian nasional serta kestabilan perekonomian global. Sedangkan untuk jangka pendek hanya variabel kestabilan perekonomian nasional dan kestabilan perekonomian global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Siwi Nur Indriyani (2016) menulis penelitian tentang Analisis Pengaruh Infasi dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2005-2015. Dengan model analisis menggunakan regresi linier penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2005-2015.

Adapun beberapa penelitian lain di berbagai negara tentang pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi seperti penelitian yang dilakukan oleh Tan (2020) tentang pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia, Singapura, dan Thailand memperlihatkan hasil bahwa kebijakan moneter dan fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut dimana kebijakan moneter lebih efektif di negara Malaysia dan Singapura, sedangkan kebijakan fiskal lebih efektif di negara Thailand.

Penelitian yang dilakukan Tung (2022) tentang pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di Vietnam menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Vietnam dimana kebijakan moneter lebih besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Vietnam dibandingkan dengan kebijakan fiskal.

BAB III

RERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Rerangka Konseptual

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu pembangunan yang terjadi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mempengaruhi peningkatan percepatan pembangunan ekonomi di suatu negara tersebut, yang pada akhirnya berindikasi dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi mengacu pada pertambahan yang sifatnya kuantitatif (*quantitative change*).

Pada umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) dari waktu ke waktu. Produk Domestik Bruto (PDB) ini mencerminkan pendapatan dari faktor-faktor produksi dalam suatu negara. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tersedia di negara tersebut. Dengan semakin banyaknya faktor-faktor yang tersedia di negara tersebut, maka pertumbuhannya semakin baik juga. Namun dalam kenyataannya ketersediaan faktor-faktor produksi yang melimpah di suatu negara, sering kali tidak selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Faktor-faktor lain seperti kestabilan perekonomian negara, kestabilan perekonomian dunia serta kebijakan-kebijakan yang di buat pemerintah juga saling berkaitan dalam mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Dalam kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan dalam bidang fiskal dan moneter sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan yang berhubungan dengan pajak, pengeluaran pemerintah, tingkat suku bunga, dan jumlah uang beredar tersebut dapat mempengaruhi perekonomian

negara. Oleh karena itu, pemerintah (sektor riil) dan bank sentral (sector moneter) selalu membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan perkembangan dinamika ekonomi nasional dari tahun ke tahun. Kebijakan-kebijakan yang dibuat ini diharapkan dapat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Timbulnya masalah pengangguran akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara karena apabila seseorang tidak bekerja maka dia tidak akan memproduksi sehingga perhitungan output produksi dalam bagian PDB akan berkurang. Serta pentingnya investasi dimana Investasi adalah langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai belanja tidak langsung dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Watulingas et al., 2016). Besarnya pendapatan negara dengan pajak sebagai peyumbang terbesar yang dianggarkan dalam APBN mempengaruhi alokasi belanja yang akan dilakukan oleh Pemerintah, salah satunya adalah belanja infrastruktur. Apabila infrastruktur di Indonesia meningkat, maka akan berdampak pada kegiatan perekonomian, salah satunya dengan memperlancar arus barang dan jasa.

Selain penyediaan fasilitas fisik, hasil dari pajak daerah dapat juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kreatifitas dan menarik minat masyarakat untuk turut serta, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut ditambah lagi dengan tersedianya fasilitas publik baru, terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat akan tercipta yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat pengangguran di kabupaten/kota tersebut (Kresnandra & Erawati, 2013). Dengan lancarnya arus barang dan jasa maka akan meningkat pula volume perdagangan di Indonesia yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Darusman, 2019).

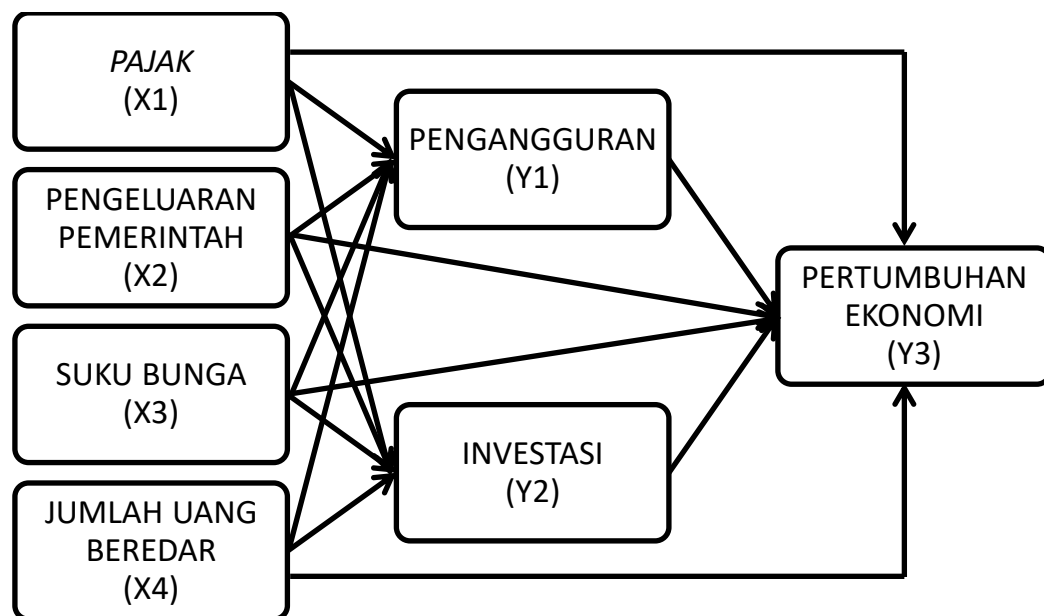
Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah (Lubis, 2014). Meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan adanya pengeluaran pemerintah yang diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung jika meningkat maka menyebabkan GNP akan meningkat pula. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung (Anitasari & Soleh, 2012).

Suku bunga mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat dan mempunyai dampak penting terhadap perekonomian. Selain itu, suku bunga juga memengaruhi keputusan dalam hal mengkonsumsi, menginvestasi, dan menabung (Hazmi, 2018). Tingkat suku bunga yang rendah dapat membuat investasi meningkat dan pada akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat (Asnawi & Fitria, 2018). Kenaikan BI 7-Day Repo Rate akan mendorong kenaikan suku bunga dana antar bank dan suku bunga deposito yang akan mengakibatkan kenaikan suku bunga kredit. Sementara jika BI 7-Day Repo Rate diturunkan dikhawatirkan akan memicu pelarian dana jangka pendek yang akan mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi (Indriyani, 2016).

Perekonomian suatu negara tidak terlepas dari kegiatan pembayaran uang. Jika membahas tentang lalu lintas pembayaran uang berarti menyangkut jumlah uang beredar. Jika jumlah uang beredar tinggi, maka menyebabkan inflasi. Kemudian, bila jumlah uang beredar sangat rendah akan menyebabkan kelesuan

terhadap ekonomi. Jika hal ini terjadi terus menerus, kesejahteraan masyarakat akan menurun (Siburian & Murtala, 2019). Jumlah uang beredar yang ada pada masyarakat harus berkembang secara wajar. Hal ini tentunya akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian, namun perkembangan yang terlalu meningkat tajam akan dapat memicu inflasi yang tentunya memberikan pengaruh negative terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dampak yang sama akan dirasakan oleh investor dalam kegiatan investasi mereka, dimana kegiatan investasi akan menurun ketika inflasi meningkat.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat diambil rerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 3.1 Rerangka Konseptual

3.2 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diduga pajak secara langsung dan secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pengangguran dan investasi.

- b. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara langsung dan tidak langsung melalui pengangguran dan investasi.
- c. Diduga suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara langsung dan tidak langsung melalui pengangguran dan investasi.
- d. Diduga jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara langsung dan tidak langsung melalui pengangguran dan investasi.